

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak jaman dahulu kota-kota di Indonesia telah dikenal sebagai pusat kegiatan/pelayanan dimana kota menyajikan barang dan jasa serta sarana dan prasarana yang lengkap bagi masyarakat di wilayah sekitarnya hal ini secara alami memiliki potensi daya tarik dan berpengaruh besar bagi daerah-daerah sekelilingnya (Christaller 1933 dalam muliana 2018) . Penduduk dari berbagai desa dan daerah sekitarnya datang ke kota untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan hidupnya. Pelayanan administrasi dan berbagai kepentingan penduduk semakin kompleks, maka daerah kota semakin berkembang menjadi kota-kota besar di antaranya Kota Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Medan (Setiawan, 2003). Dengan adanya fungsi kota sebagai pusat administrasi, seiring dengan itu terdapat juga fungsi kota sebagai pusat perdagangan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan pusat rekreasi. Semua itu menjadi daya tarik bagi masyarakat kota dan di luar kota.

Kota-kota besar di Indonesia terus mengalami perkembangan, salah satunya lapangan pekerjaan. Dalam lapangan pekerjaan ini sangat beranekaragam terutama pada sektor-sektor di luar pertanian seperti industri dan jasa, oleh karena itu banyak penduduk dari desa pindah ke kota-kota besar dengan alasan mencari pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan dan memperoleh kehidupan yang lebih baik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Akibat dari perpindahan penduduk tersebut, akhirnya menimbulkan masalah di kota yakni penambahan jumlah dan kepadatan penduduk tidak

terkendalikan, hal itu menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana permukiman di kota.

Bagi masyarakat kota-kota besar di Indonesia yang terdapat disetiap ibu kota provinsi seperti Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Makasar, Palembang, dan Kota Medan, banyak masyarakatnya yang berpenghasilan rendah sudah tentu tidak mampu membeli tanah dengan harga tinggi. Selain itu sulit memperoleh perumahan yang layak sebagai tempat tinggal. Keadaan ini mendorong mereka membangun tempat tinggal di bantaran sungai, pinggir rel kereta api, tanah-tanah kosong dan adakalanya membeli tanah kosong dengan harga yang murah. Rumah-rumah yang dibangun tersebut tumbuh menjadi permukiman kumuh dan berkembang dengan memiliki pola pembangunan yang tidak teratur. Selanjutnya pola ini terus meningkat dan tidak hanya terdapat ditengah-tengah kota, tetapi juga di pinggiran kota (Poerba, 1993).

Keberadaan permukiman kumuh dapat dilihat dari karakteristik fisiknya yakni (1). Kondisi bangunan gedung (2). Kondisi jalan lingkungan (3). Kondisi penyediaan air minum (4). Kondisi drainase lingkungan (5). Kondisi pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis, (6). Kondisi pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis, (7). Proteksi kebakaran sangat minim. Dari kondisi tersebut dapat diukur untuk mengetahui tingkat kekumuhan suatu permukiman yang dapat dibedakan atas tiga tingkat yakni (1) kekumuhan berat dimana indikator permukiman kumuh terpenuhi pada rentan 76 – 100 % (2) kekumuhan sedang dimana indikator permukiman kumuh terpenuhi pada rentan 51 – 75 % (3) kekumuhan ringan dimana indikator permukiman kumuh terpenuhi pada rentan 25 – 50 %. Permukiman

kumuh tersebut tidak hanya dilihat dari karakteristik fisiknya tetapi juga dapat dilihat dari karakteristik sosial ekonominya mencakup (1). Pendidikan (2). Jenis pekerjaan (3) Pendapatan (Permen PUPR RI No. 14 Tahun 2018 dan Wirutomo, 2012).

Permukiman kumuh tetap menjadi suatu masalah di wilayah perkotaan dan upaya penanganannya harus diatasi oleh pemerintah kota. Sehubungan dengan itu pemerintah melakukan upaya yakni (1) pemugaran (2) peremajaan (3) permukiman kembali (Permen PUPR RI No. 14 Tahun 2018). Walaupun pemerintah telah melaksanakan upaya penanganan permukiman kumuh namun hasilnya belum optimal karena keberadaan permukiman kumuh masih banyak terdapat di kota-kota besar.

Kota Medan sebagai Ibu kota Provinsi Sumatera Utara memiliki luas 265,10 km² yang terdiri dari 21 kecamatan di antaranya Kecamatan Medan Amplas, Medan Belawan, Medan baru dan Kecamatan Medan Tembung (Kantor Walikota Medan, 2021). Kota ini sangat menarik bagi daerah sekitarnya terutama daerah pedesaan, hal ini mengingat Kota Medan sebagai pusat Ibu Kota Provinsi yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan pusat industri. Hal tersebut menyebabkan penduduk desa pindah ke kota Medan dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan agar hidupnya lebih baik. Namun keadaan itu, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga banyak penduduk memiliki pendapatan yang rendah, hal ini mengingat jenis pekerjaannya berada pada sektor informal. Sesuai dengan pendapatannya yang diperoleh akhirnya mereka tinggal di permukiman kumuh diantaranya

disepanjang bantaran sungai dan bantaran rel kreta api. Luas permukiman kumuh di kota Medan seluas 172,83 Ha yang menyebar di 18 Kecamatan dan 42 Kelurahan diantaranya Kecamatan Medan Denai dengan luas 16,07 Ha, Medan Timur luasnya 5,58 Ha, Medan Labuhan dengan luas 26,11 Ha, Medan Belawan luasnya 51,43 Ha dan Kecamatan Medan Tembung dengan luas 2,41 Ha (Kotaku.pu.go.id).

Kelurahan Bantan berada di Kecamatan Medan Tembung. Di kelurahan ini dihuni 38.399 (6.865 KK) yang mendiami luas wilayah 1,5 km². Kepadatan penduduk dikelurahan ini tergolong yang kedua tertinggi setelah kelurahan Bandar Selamat di kecamatan Medan Tembung. Kepadatan penduduk di kelurahan ini mencapai 25.599 jiwa/km² (Kantor Kelurahan Bantan 2021). Kelurahan Bantan merupakan salah satu kelurahan yang memiliki permukiman kumuh seluas 2,41 Ha. (Kotaku.pu.go.id). Salah satu lokasi permukiman kumuh dikelurahan ini berada di sepanjang bantaran rel kereta api yang dihuni sebanyak 258 kepala keluarga. Hal ini terjadi karena pada umumnya pendapatan keluarga yang relatif rendah atau belum mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, dimana sebagian besar masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh tersebut bekerja sebagai pemulung. Hal itu dapat dilihat dari keadaan bangunan non permanen yang memiliki dinding (papan, triplek, seng). Lantai (semen) serta atap yang terbuat dari seng. Selain itu juga terdapat bangunan semi permanen dan permanen (dinding batu dan papan, seng, papan) dengan ukuran luas relatif kecil dengan setengah dinding rumah menggunakan seng, dan jalan lingkungan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (hasil observasi penulis di kelurahan Bantan, 2021).

Penduduk yang tinggal di daerah permukiman itu pada umumnya bekerja di sektor informal seperti pemulung, buruh kasar, penarik becak dan pembantu rumah tangga. Keadaan tersebut berkaitan dengan karakteristik fisik, sosial, tingkat kekumuhan dan upaya penanganan permukiman kumuh. Sehubungan dengan itu perlu dikaji Karakteristik Permukiman Kumuh di Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Pada umumnya pendapatan keluarga di permukiman kumuh kelurahan Bantan relatif rendah atau belum mampu memenuhi kebutuhan keluarganya (2) Karakteristik fisik permukiman kumuh (3) Karakteristik sosial ekonomi permukiman kumuh (4) Permukiman kumuh memiliki tingkat kekumuhan (5) upaya penanganan permukiman kumuh di kelurahan Bantan kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

C. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Karakteristik fisik permukiman kumuh di Kelurahan Bantan (2) Karakteristik sosial ekonomi permukiman kumuh di Kelurahan Bantan (3) Tingkat kekumuhan permukiman kumuh Kelurahan Bantan (4) Upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pembatasan masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana karakteristik fisik dan tingkat kekumuhan permukiman kumuh di kelurahan Bantan?
2. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi permukiman kumuh di kelurahan Bantan?
3. Bagaimana upaya penanganan permukiman kumuh yang di lakukan oleh pemerintah di Kelurahan Bantan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik fisik dan tingkat kekumuhan permukiman kumuh di kelurahan Bantan
2. Untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi permukiman kumuh di kelurahan Bantan.
3. Untuk mengetahui upaya penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah di kelurahan Bantan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kota Medan agar dapat membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi/meminimalisir kususnya dikelurahan Bantan
2. Menambah wawasan peneliti dan pembaca.

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya terutama dalam membahas objek yang

